BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUTAN LINDUNG DAN HUKUM LINGKUNGAN SERTA LINGKUNGAN HIDUP

A. Konsep Umum Hutan

1. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan- kawasan semacam ini terdapat di wilayah- wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah , dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.¹⁸

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin. Di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon itu sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun- tahun, jadi berbeda dengan sayur- sayuran atau padi- padian yang hidup bertahun- tahun , jadi tentu berbeda dengan sayur- sayuran atau padi-padian semusim saja. Pohon juga berbeda karena sangat mencolok, memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang

¹⁸<http://bunz.wordpress.com> di akses tanggal 19 Desember 2016.

dan bentuk tajuk(mahkota daun) yang sangat jelas, Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk kedalam ruangan sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda daripada daerah perlandangan sekitarnya. Pemandangan pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil- kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian- bagian penyusun yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Berdasarkan Pasal 2, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, menyatakan bahwa : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”¹⁹

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas,yaitu :

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang di sebut tanah hutan.
- b. Unsur Pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- c. Unsur lingkungan
- d. Unsur penetapan Pemerintah

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertical, karena antara lapangan(tanah),pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.

2. **Jenis- jenis Hutan**

Posisi Indoonesia yang berada di garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia berada dalam kawasan Tropis, artinya cuaca yang mengirinya berimbang antara hujan dan kemarau. hal ini berdampak pada perkembangan jenis- jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. hal ini berdampak pada pada perkembangan jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman.

¹⁹ Pasal 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang – Undang, Fokusmedia, Bnadung, 2007.hlm 13-14.

hal ini di mungkinkan karena dukungan lingkungan dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam tanaman di Indonesia.

Jenis-jenis hutan sendiri terdapat beberapa macam. Dimana pengelompokannya sudah disusun dengan berdasarkan pada aspek pengelompokan ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam Identifikasi serta pengelolaan hutan itu sendiri. Secara umum, jenis-jenis hutan di Indonesia di bagi ke dalam enam kelompok besar. Dimana dari keenam kelompok itu, pada nantinya masih di bagi kedalam beberapa sub jenis. Secara umum, hutan di kelompokkan menjadi enam bagian. Keenam bagian tersebut adalah :

- a. Hutan yang dikelompokkan berdasarkan iklim
- b. Hutan berdasarkan Variasi iklim, jenis tanah, dan bentang alam
- c. Hutan berdasarkan terbentuknya
- d. Jenis- jenis hutan berdasarakan status
- e. Hutan berdasarakan jenis tanamannya
- f. Berdasarkan Fungsinya²⁰

Keenam jenis hutan, masing- masing masih memiliki sub bagian sendiri. Hal ini karena pada masing- masing bagian, memiliki pengelompokan yang lebih spesifik lagi. Seperti pada hutan yang di kelompokkan berdasarkan musimnya, di dalam kelompok tersebut masih terbagi menjadi dua yaitu Hutan Hujan Tropika dan Hutan Monsun.

²⁰ [http:// www. Anneahira.com](http://www.Anneahira.com) di akses tanggal 19 Desember 2016

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang, di tentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan statusnya, fungsinya, tujuan khusus , dan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air. Keempat jenis hutan itu dikemukakan sebagai berikut :

- a. Hutan berdasarkan statusnya (pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).

Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya di bagi dua macam, yaitu :

- 1) Hutan Hak, adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah (Pasal 5, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999).
- 2) Hutan Negara, adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak keatas tanah. Yang termasuk dalam kulifikasi hutan negara yaitu :
 - a) Hutan adat, adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaanya kepada masyarakat hukum adat(*rechtsgemeenschap*).

- b) Hutan desa, adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan di manfaatkan untuk kesejahteraan desa.
 - c) Hutan Kemasyarakatan, adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
- b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaanya. Hutan ini dapat di golongan menjadi tiga macam, di antaranya :
- 1) Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain :
 - a) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawassan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - b) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas yang tertent yang mempunyai fungsi pokok

perlindungan sistem penyangga penghidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

- c) Taman buru, adalah kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu.
 - 2) Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - 3) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan , pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Syaratnya tidak merubah fungsi pokok kawasan hutan.
- d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan

kota adalah hutan yang berfungsi sebagai resapan air (pasal 9, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang).

3. Manfaat Lahan dan Hutan

a. Lahan

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kepentingan dan ketergantungan manusia pada lahan semakin meningkat pula, yaitu peningkatan insfrastruktur, usaha pertanian, maupun usaha- usaha di bidang lainnya. Usaha- usaha tersebut memerlukan lahan sebagai tempat untuk melaksanakan pembangunan.

Manfaat lahan secara umum dapat dibagi dari beberapa macam manfaat yaitu :

- 1) Lahan yang mempunyai fungsi lindung ternyata sebagai atau seluruhnya telah lama dihuni oleh penduduk. Berbagai kegiatan sosial ekonomi telah di laksanakan secara turun- temurun dan telah tertanam secara kuat nilai- nilai sosial budaya yang berakaitan dengan yang di tempatinya.
- 2) Lahan mempunyai fungsi lindung telah di tetapkan sebagai atau seluruhnya telah terlanjur di serahkan kepada pengusaha, seperti HPH dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Lahan budidaya potensial yang telah ditetapkan untuk pengembangan produksi pertanian ternyata banyak yang belum

dapat di jangkau, tidak berpenduduk atau penduduknya sangat jarang.

- 4) Adanya benturan kepentingan antara berbagai faktor tertentu seperti misalnya lahan budi daya yang telah diperuntukkan bagi suatu sektor tertentu yang potensial (pengairan atau pertambangan) ternyata telah dihuni oleh penduduk dengan kegiatan pertanian yang telah dilakukan secara turun temurun.

b. Hutan

Hutan merupakan sebuah wilayah atau kawasan yang ditumbuhi aneka pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan hutan tersebar luas di penjuru dunia, baik di daerah tropis maupun daerah dengan iklim yang dingin. Tuhan menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi keindahan bumi-nya, namun di sini lah kita akan menemukan manfaat hutan sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi. diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Menghasilkan Oksigen bagi Kehidupan

Hutan adalah kumpulan pepohonan yang berperan sebagai produsen oksigen. Tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen dari proses *Fotosintesis* yang berlangsung di daun tumbuhan tersebut. Dengan jumlah pepohonan yang cukup luas, tentunya hutan akan memebrikan suplay kebutuhan oksigen yang cukup besar bagi kehidupan di muka bumi. Sebagai contoh saat kita berada di kawasan padang tandus yang tidak ditumbuhi

pepohonan hijau, apa yang kita rasakan? Dan setelah itu cobalah berteduh di bawah pohon yang rindang . Trntu akan tersa jelas perbedaan suasana yang kita rasakan . Begitula pula fungsi hutan sebagai penyedia oksigen kehidupan.

2) Menyerap Karbon dioksida

Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses *Fotosintesis* Sebuah keseimbangan alam yang luar biasa telah Allah ciptakan untuk kehidupan manusia . Karbon dioksida adalah gas berbahaya apabila dihirup secar berelebihan oleh manusia. Sebagai contoh Anda menghirup asap kendaraan bermotor, ini jelas akan sangat mebahayakan manusia.

Namun ternyata di sisi lain tumbuhan memerlukan gas tersebut untuk menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh mkhluk hidup yang ada di bumi. Akan memberikan peluang penyerapan karbon dioksida yang lebih besar. Akibatnya udara di muka bumi akan bersih dan jumlah oksigen yang dihasilkan hutan pun akan semakin besar.

3) Mencegah Erosi

Keberadaan kawasan hutan yang luas juga akan membantu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Pengikatan tanah dapat disebabkan oleh air. Hutan yang luas akan menyerap dan menampung sejumlah air yang besar. Akibatnya banjir dan tanah longsor dapat dikembalikan.

Kawasan yang tandus dan gersang biasanya akan rawan dengan bencana longsor, Inilah fungsi lahan yang lain dan kerap kita lupakan. Para penebang hutan secara liar melakukan penggundulan hutan tanpa rasa tanggung jawab terhadap keselamatan bumi. mereka sebenarnya tak hanya berkhianat kepala banyak orang. Tapi juga kepada bumi sebagai tempat tinggal mereka.

4) Kawasan Lindung dan Pariwisata

Hutan juga berfungsi sebagai tempat untuk melindungi aneka hewan dan tumbuhan langka. Habitat mereka dilestarikan di kawasan hutan khusus. Di samping itu hutan juga dapat berfungsi sebagai objek penelitian.

Hutan berdasarkan fungsinya (pasal 6 sampai dengan pasal 7 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang). Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, diantaranya :

- a) Hutan Konservasi, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengwetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari tiga macam antara lain:

- 1) Kawasan hutan suaka alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
 - 2) Kawasan hutan pelestarian alam, adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga penghidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
 - 3) Taman buru, adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
- b) Hutan lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c) Hutan produksi, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

4. Landasan Pembangunan Kehutanan

Pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional dengan tujuan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya-

besarnya bagi kehidupan bagi kepentingan pengelolaan sumber daya alam yang berupa hutan. Di dalam Pembangunan kehutanan kehutanan terdapat suatu landasan yaitu landasan filosofis, landasan konstitusional, landasan konsepsional yang ketiganya telah ditetapkan secara nasional.

a. Landasan Filosofis

Dalam landasan filosofis dijelaskan bahwa pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka harus mampu pula menunjukkan rangkaian usaha yang mencerminkan pengalaman Pancasila, bangsa Indonesia dalam membangun sektor kehutanan akan tetap terjaga dan selalu berada dalam rangkuman kiprah pembangunan nasional.

b. Landasan Konstitusional

Dalam Indonesia ini dijadikan bahwa pembangunan pedoman yang telah ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 amademen keempat dalam pasal 33 butir (3), ditegaskan bahwa hutan sebagai salah satu kekayaan alam hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Landasan Konsepsional

5. **Asas, Tujuan dan Pembangunan Kehutanan**

Asas pembangunan kehutanan adalah kelestarian hutan dan manfaat yang progresif. Hal ini dapat pula diklasifikasikan sebagai pembangunan kehutanan yang berorientasi pada tata lingkungan hidup manusia.

Atas dasar dan orientasi itu tujuan yang akan dicapai dalam pembangunan kehutanan adalah manfaat yang sebesar-besarnya secara sebaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung, dalam usaha turut membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sesuai dengan asas dan tujuan tersebut, maka pembangunan kehutanan meliputi, antara lain:

a. Ideologi /Politik

Pancasila sebagai tujuan hidup bangsa Indonesia, menganut asas keseimbangan dan keselarasan antara manusia dengan penciptanya, Tuhan Yang Maha Esa, antara manusia dengan alam semesta (antara lain hutan yang kaya raya dengan flora dan fauna) ciptaan Tuhan, dan antara manusia dengan manusia lainnya. Manfaat hutan secara seimbang dan serasi merupakan pencerminan rasa syukur bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan upaya pembangunan manusia Pancasila seutuhnya yang mencitai tanah air dan bangsa.

b. Sosial Ekonomi

Pembangunan Kehutanan mempunyai peranan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini dapat dicapai melalui:

- 1) Peran pembangunan kehutanan di dalam bidang produksi untuk meningkatkan pendapatan Negara (dalam dan luar negeri sebagai

devisa negara), serta menyediakan kayu dan hasil hutan lainnya untuk industry dan masyarakat.

- 2) Peranan kehutanan yang berfungsi melindungi anatara lain: pengaturan klimatologi, dan lingkungan hidup yang memebrikan dampak pada terpeliharanya kesuburan tanah, peningkatan produktivitas tanah, pengaturan debit air untuk menyediakan pengairan sawah, perikanan, air, air minum,dsb.

c. Sosial Budaya

Peranan hutan yang tercerminkan dalam bentuk kekayaan flora dan fauna, serta keindahan alam dalam pengembangan budaya bangsa, berproyeksi menurut kurun waktu:

- 1) Masa lalu, hutan merupakan media tempat lahirnya inspirasi dan pengablengan eksistensinya dalam menghadapi tantangan dalam dan lingkungan, sehingga secara seimbang manusia merupakan bagian dari alam sekelilingnya.
- 2) Masa sekarang dan masa yang akan datang, hutan merupakan sarana untuk meningkatkan kehidupan manusia , baik secara fisik maupun mental, lansung maupun tidak langsung.

d. Pertahanan dan Keamanan

Peranan hutan dan kehutanan dalam perubahan dan keamanan diberbagai zaman akan tetap sebagai baris pertahan atau sumber logistic dalam mana damai dan masa perang.

6. **Hukum Kehutanan**

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkan Regelemen Hutan 1865. Namun, perhatian ilmuan hukum terhadap bidang ini sangat kurang.

“Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehuatanan, serta hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan”²¹

Hukum kehutanan menurut biro Hukum dan Oraganisasi Departemen Kehutanan yaitu:

“Hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang berangkut paut dengan pengurusannya”.²²

Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Bowezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno yang disebut *Forrest law* (hukum kehutanan) adalah mengatur hutan-hutan kerajaan.

“The System or body of law relating to the royal forest, artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan yang menngatur hutan-hutan kerajaan”.²³

Kesimpulannya bahwa hukum kehutanan dapat di rumuskan menjadi beberapa bagian, antara lain:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis maupun tidak tertulis.
- b. mengatur hubungan antara individu(perorangan) dengan hutan dan

²¹Salim H.S., Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika Jakarta 2003

²² Op cit hlm 235

²³ Black,1979

- c. mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

B. Lahan dan Perkebunan

Kondisi umum lahan dan perkebunan di Indonesia bisa di wakili dengan melihat kondisi lahan dan perkebunan yang tersebar di pulau Sumatra.

“Menurut Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLNH), melalui Program Menuju Indonesia Hijau selalu memantau perkembangan lahan yang terdapat di Indonesia Dari interpretasi citra satelit oleh KLNH tahun 2011, penutupan lahan bervegetasi di hutan lindung dan kawasan berfungsi lindung yang mencakup sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan yang memiliki kelerengan 40% yaitu di beberapa pulau cukup rendah seperti Pulau Sumatera sebesar 9,70% dari total luasan Pulau Sumatera, Pulau Jawa sebesar 2,78%, Pulau Kalimantan sebesar 10,45%, Pulau Bali Nusa Tenggara sebesar 10,96%, Pulau Sulawesi sebesar 21,97%, Pulau Maluku sebesar 15,65% dan Pulau Papua sebesar 19,06%. Program MIH diharapkan dapat merespon kondisi tersebut sehingga dapat menurunkan laju deforestasi dan mencegah bertambahnya luasan lahan kritis. Respon ini dapat berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam rencana pembangunan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”²⁴

Pulau Sumatra merupakan pulau yang banyak terdapat lahan gambut yang luasnya dalam skala besar yang tersebar dari provinsi Bengkulu hingga provinsi Sumatera Utara. Pembukaan lahan gambut untuk pengembangan pertanian atau pemanfaatan lainnya secara langsung mengubah ekosistem kawasan gambut yang telah mantap membentuk suatu ekosistem baru. Pengembangan pertanian di lahan gambut dapat di artikan

²⁴ <http://www.Menhl.go.id> diakses tanggal 4 januari 2017

sebagai upaya peningkatan fungsi produksi. Antara fungsi produksi dan fungsi perlindungan dalam ekosistem lahan gambut saling berhubungan dan saling mempengaruhi jika fungsi perlindungan dalam ekosistem menurun, maka fungsi produksi dapat terganggu.²⁵

Selain itu lahan gambut yang terdapat di pulau sumatera khususnya Propinsi riau banyak di jadikan pembukaan lahan Perkebunan di bidang perkebunan kelapa sawit sehingga terjadinya tidak seimbang nya lahan gambut tersebut yang menyebabkan kurangnya serapan air hujan kedalam tanah.

1. Pengertian Lahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah lahan berarti tanah terbuka, tanah garapan. Lahan diartikan sebagai suatu tempat terbuka di permukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk lahan pertanian, untuk membangun rumah, dan lain-lain.

Istilah lahan digunakan berkenaan dengan permukaan bumi beserta segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi perikehidupan manusia (Christian dan Stewart, 1968). Secara lebih rinci, istilah lahan atau land dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan

²⁵ Muhammad Noor, *Pertanian Lahan Gambut*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hlm 79.

oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang; yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa yang akan.

Lahan Sebagai sistem sumber daya dan sistem lingkungan Dalam berbagai literatur, ada pembedaan yang sangat tajam antara istilah sumber daya (*resource*) dan lingkungan (*environment*). Sehingga ,selanjutnya dibedakan antara pengelolaan sumber daya dan pengelolaannya,baik sumber daya,maupun sebagai sumber daya,maupun sebagai komponen.lingkungan²⁶

a. Jenis-jenis Lahan berdasarkan bentuk Ekosistemnya

1) Lahan Basah adalah Lahan basah atau wetland adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen (menetap) atau musiman. Lahan basah adalah suatu wilayah yang tergenang air, baik alami maupun buatan, tetap atau sementara, mengalir atau tergenang, tawar asin atau payau, termasuk di dalamnya wilayah laut yang kedalamannya kurang dari 6 m pada waktu air surut paling rendah. Wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang-kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Manfaat Lahan Basah, antara lain:

- a) Mencegah banjir
- b) Mencegah abrasi pantai
- c) Mencegah intrusi air

²⁶ Sumbangan Baja, *Perencanaan tata Guna lahan dan pengembangan wilayah*, kanisius, Yogyakarta, 2005. hlm. 4

- d) Menghasilkan material alam yang bernilai ekonomis
- e) Menyediakan manusia akan air minum, irigasi, mck, dsb.
- f) Sebagai sarana transportasi
- g) Sebagai sarana pendidikan dan penelitian

Adapun contoh lahan basah ialah seperti sawah, rawa, hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, danau dan sungai yang tersebar dari aceh hingga papua dan paling banyak khususnya terdapat di Sumatra.

2) Lahan Kering

Lahan kering adalah lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya mengharapkan dari curah hujan. Lahan ini memiliki kondisi agro-ekosistem yang beragam, umumnya berlereng dengan kondisi kemantapan lahan yang kurang atau peka terhadap erosi terutama bila pengolahannya tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah. Contoh lahan kering yang terdapat di Indonesia adalah seperti lading, kebun, perkarangan, kolam perkarangan dan tambak.

3) Perencanaan tata guna lahan wilayah

Perencanaan tata guna lahan adalah untuk menciptakan kondisi penggunaan lahan yang efisien dan produktif. Secara umum dapat dikatakan suatu areal tertentu akan lebih cocok daripada areal yang lainnya untuk penggunaan lahan tertentu

karena perbedaan persyaratan efisiensi dan produktifitas. Efisiensi dicapai dengan pencocokan guna lahan yang berbeda dengan areal yang menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya minimal. Dalam praktik tidak selalu jelas dengan mana pada cara pandang ,dari sudut pandang individu,misalnya penggunaan lahan fokus pada keuntungan terbesar atas modal dan tenaga kerja yang di investasikan atau mungkin di ukur dengan valuta asing dengan memproduksi barang untuk ekspor ataupun untuk impor, peningkatan pendapatan daerah atau Negara, peningkatan Income perkapita, dan lain-lain.

4) Perencanaan Tata Lahan dalam Konteks tata ruang

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang penata gunaan lahan yang rasional akan lebih terbantuan dalam hal memaksimalkan prosedur-prosedur yang baku dalam skla perencanaan .

Perencanaan tata guna lahan sering di perukarkan dengan istilah perencanaan penggunaan lahan,karena pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Dalam berbagai literatur, kedua istilah ini di sebut *land use planning*. Sedikit perbedaan keduanya hanya terletak pada ruang (*space*) Tata guna lahan secara implisit mengandung pengertian ruang di dalamnya, karena terkait dengan tata guna penataan atau pengturan ruang di dalamnya, karena terkait dengan tata guna.

Penataan atau pengaturan penggunaan lahan tidak di tekankan seperti itu. Dengan demikian, perencanaan tata guna lahan juga memiliki relevansi dan bahkan sama dengan pengertian perencanaan tata ruang(*Spatial Planning*).

Definsi perencanaan tata guna lahan perlu di lihat secara komprehensif dari sisi perencanaan,tata guna, dan lahan.secara umum, perencanaan dapat di definisikan sebagai proses menyiapkan dan mebuat sekumpulan keputusan untuk untuk tindakan-tindakan di masa depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan melalui usaha optimal. Keputusan dan tindakan dilakukan terhadap upaya tatta guna (menata penggunaan) yang diinginkan (berdasarkan pertimbangan yang di tetapkan) tentang lahan, baik pada rentang waktu pendek (saat ini) maupun masa yang akan dating.

Tata guna lahan adalah wujud dalam ruang di alam tentang bagaimana penggunaan lahan tertata, baik secara alami maupun di rencanakan. Dari sisi alami dapat terus berkembang tanpa harus ada penataan melalui suatu intervensi.

Sedangkan pada keadaan yang di rencanakan, tata guna lahan akan terus berkembang sesuai upaya perwujudan pola struktur,ruang jangka waktu yang di tetapkan.

FAO(1993) memandang perencanaan tata guna lahan(*land use planning*)dari sisi intervensi dalam memberikan dalam

dorongan dan bantuan pada pengguna lahan(land use planning) dari sisi intervensi dalam memberikan dorongan dan bantuan pada pengguna lahan(land users)dalam menata lahan, dengan memberikan definisi secara sederhana sebagai berikut:

Land use planning means the systematic assessment of physical, social, and economic factors in such a way as to encourage and assist land users in selecting options that increase their productivity, are sustainable and meet the needs of society.²⁷

Penekanan terhadap perencanaan dalam buku ini maksudnya adalah adanya intervensi, baik dari sisi kebijakan yang diperkuat oleh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun aktifitas sosial ekonomi yang terorganisasi secara baik. Disinilah prinsip dan teknik penataan dan zonasi itu diperlukan, melalui pertimbangan efisiensi, ekuitas (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*)

Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka perencanaan tata guna lahan dapat didefinisikan secara lengkap sebagai:

“Aktifitas penilaian secara sistematis terhadap potensi lahan (dan termasuk air) dalam rangka untuk memilih, mengadopsi, dan menentukan pilihan penggunaan lahan terbaik dalam ruang berdasarkan potensi dan kondisi biofisik, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan produktifitas dan ekuitas dan menjaga kelestarian lingkungan.²⁸

²⁷ Sumbangan baja, *Perencanaan tata guna lahan dalam perkembangan wilayah*, Andi, Yogyakarta 2012, hal 6

²⁸ Ibid hlm 7

Dalam konteks perencanaan yang rasional-komprehensif, rencana tata guna lahan perlu di dukung oleh informasi yang tepat, akurat, dan terpercaya sehingga metode-metode analisis dan teori-teori serta prinsip-prinsip saintifik dapat di gunakan secara efektif. Disini dikenal adanya perencanaan atau tata guna lahan rasional(*rational land use planning*), yang dimaksud dengan perencanaan tata guna lahan rasional (*rational land use planning*) menurut Lier and de wrachien (2002) adalah:

“Perencanaan yang mengoptimalkan penggunaan (*use*) dan pengengolaan (*management*) sumber daya lahan dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara pengembangan (*development*) dan perlindungan (*protection*) serta pelestarian (*conservation*) lingkungan, melalui optimalisasi pemanfaatan data, metode dan prinsip-prinsip saintifik.”²⁹

Karena kompleksitas masalah yang terus di hadapi, istilah perencanaan tata guna lahan berkembang di beberapa negara kemudian berkembang di beberapa negara kemudian berkembang lagi men jadi perencanaan tata ruang(*spatial planning*) dengan lingkup yang lebih luas. darat, laut, dan udara.

²⁹ Ibid hlm 8

Namun, dalam prinsip penataan pada dasarnya kedua sistem perencanaan tersebut adalah sama. Dalam sejarah perkembangan dari *land use planning* tambah *transportation planning* (perencanaan tata guna lahan tambah perencanaan transportasi)

5) Sasaran dan tujuan perencanaan tata guna lahan

Sasaran (goal) perencanaan tata guna lahan adalah mendapatkan penggunaan terbaik dari lahan, melalui pencapaian efisiensi (*efficiency*), kesetaraan (*Equity*), dan penerimaan (*acceptance*), dan keberlanjutan (*sustainability*)³⁰

1) Efisiensi

Penggunaan lahan harus ekonomis dan produktif. Efisiensi dapat di capai dengan pencocokan (*matching*) jenis penggunaan lahan dengan areal tertentu yang akan menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya serendah mungkin.

Dalam perencanaan tata guna lahan, efisiensi terkait dengan besaran energi, modal dan waktu yang di habiskan untuk mencapai suatu standar output yang di tetapkan. Standar output tersebut akan berbeda menurut pandangan pengguna lahan individu maupun kelompok dan menurut pemerintah. Namun demikian, faktor terbesar yang selalu menjadi pertimbangan efisiensi adalah pembatas

³⁰ Ibid Hlm 10

(*counstraint*) pengguna lahan, baik fisik maupun sosial ekonomi dan budaya yang brimplikasi pada besaran energy, modal dan waktu yang di perlukan.

Kemudian efisiensi juga mengacu pada kelayakan ekonomi dari rencana penggunaan lahan. Secara ekonomi suatu rencana harus dapat menghasilkan output yang lebih yang lebih dari biaya yang di keluarkan.

Kemudian efisiensi juga mengacu pada kelayakan ekonomi dari rencana penggunaan lahan. Secara ekonomi suatu rencana harus dapat menghasilkan output yang lebih pada biaya yang dikeluarkan. Jadi salah satu tujuan dari perencanaan zonasi tata guna lahan adalah untuk menciptakan kondisi penggunaan lahan tertentu karena perbedaan persyaratan efisien dan produktif. Secara umum dapat dikatakan suatu areal tertentu akan lebih cocok daripada areal lainnya untuk penggunaan lahan tertentu karena perbedaan efisiensi dan perbedaan.

Efisiensi dicapai dengan pencocokan guna lahan yang berbeda dengan areal yang akan menghasilkan manfaat terbesar dengan biaya minimal. Dalam praktik, tidak selalu jelas mana penggunaan lahan yang menguntungkan dan mana yang tidak, tergantung cara pandang.

Dari sudut pandang individu, misalnya pengguna lahan fokus pada keuntungan terbesar atas modal dan tenaga kerja yang di investasikan atau manfaat terbesar dari area yang tersedia. Sudut pandang pemerintah lebih kompleks mungkin di ukur dari peningkatan valuta asing dengan memproduksi barang untuk ekspor atau substitusi impor, peningkatan pendapat daerah atau negara, peningkatan income perkapita dan lain-lain.

2) Ekuitas, penerimaan, dan Preferensi

Salah syarat terpenting dari perencanaan tata guna lahan adalah bahwa jenis dan sebaran penggunaan lahan juga harus diterima secara sosial oleh komunitas di wilayah perencanaan. Sasaran ekuitas (equity), penerimaan (acceptability), dan preferensi adalah dalam bentuk capaian yang bersifat sosial dan kebersamaan, misalnya ketahanan pangan, ketenagakerjaan, dan keamanan pendapatan, pengurangan ketimpangan wilayah atau kelompok, persamaan hak, dan lain-lain.

Dalam kasus tertentu di wilayah-wilayah yang baru berkembang, upaya perbaikan dan redistribusi lahan perlu dilakukan untuk mengurangi ketidaksetaraan atau untuk mengurangi kemiskinan absolut. Untuk perencanaan tata guna lahan pedesaan (rural planning), salah satu cara untuk

memenuhi sasaran equitas adalah dengan menetapkan standar batas kualitas hidup yang harus dapat dicapai oleh komunitas dari kelompok sasaran. Standar kualitas dapat meliputi tingkat pendapatan, gizi, keamanan pangan, perumahan, keleluasaan berusaha, dan lain-lain.

Ekuitas, akseptabilitas, dan preferensi mewakili keadaan sosial dalam perencanaan penggunaan lahan. Suatu rencana harus dapat diterima oleh penduduk setempat jika tidak perubahan terkait perencanaan yang di usulkan tidak akan atau minimal sulit terjadi. Ekuitas mengacu pada bagaimana upaya untuk mencapai pemerataan kesempatan bagi semua penduduk dalam suatu standar tertentu, orang yang tinggal di wilayah perencanaan diharapkan untuk mendapatkan sesuatu (minimal suatu kesempatan) dari rencana pengguna lahan, meskipun pendapatan tambahan dan pemenuhan standar hidup komunitas dalam kawasan yang di rencanakan (keamanan, pangan, perumahan, dan lain-lain). Perencanaan untuk mencapai standar-standar ini membutuhkan alokasi lahan secara efektif serta alokasi sumber daya lainnya secara berkeadilan.

3) Keberlanjutan

Penggunaan lahan yang berkelanjutan (sustainable land use) adalah penggunaan lahan yang dapat memenuhi

kebutuhan saat ini, dan pada saat yang sama, dapat mengkonservasi sumber daya alam untuk generasi mendatang. Untuk mencapai barang yang dibutuhkan oleh generasi sekarang di kombinasi dengan konservasi sumber daya alam. Dimana produksi tersebut bergantung, sehingga memastikan bahwa produksi dapat berkelanjutan di masa yang akan datang. Suatu komunitas yang mengeskpolitasi dan melakukan pengurasan lahannya secara berlebihan dengan tidak bijaksana, berarti mengorbankan masa depannya dan generasi sesudahnya dan bahkan dapat menimbulkan dampak bagi wilayah dan kawasan di sekitarnya.

Misalnya dalam zona tata guna lahan DAS, keberlanjutan penggunaan lahan (baik individual maupun kolektif) daerah hilir sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh jenis pemanfaatan dan pengelolaan lahan pada daerah hulu. Dengan demikian penggunaan lahan harus direncanakan bagi dan oleh masyarakat secara keseluruhan karena konservasi tanah, air dan sumber lahan lainnya sering di luar kemampuan pengguna lahan secara individu.

Alasan utamanya adalah bahwa tata guna lahan, baik yang terjadi secara alami maupun karena rekayasa dan direncanakan melalui suatu konsep perencanaan yang matang,

akan berlaku satu atau hal-hal sebagai berikut yaitu tata guna lahan sebagai sumber dampak, penerima dampak, pencegah dampak dan sebagai wahana penanggulangan dampak.

2. Pengertian Perkebunan

Perkebunan dapat diartikan sebagai usaha budidaya tanaman baik oleh pemerintah maupun secara bersama-sama dalam skala luas maupun areal lahan yang digunakan namun bertujuan untuk mendapatkan pendapatan peningkatan devisa negara, tanpa mengabaikan penyerapan tenaga kerja dan pelestarian sumber daya alam.³¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas diharapkan tidak terdapat salah pengertian yang berakibat fatal, karena sebagian anggapan orang awam bahwa perkebunan merupakan suatu usaha budidaya tanaman yang berskala luas arealnya dan ditunjukkan hanya untuk mengejar keuntungan saja. Sehingga seolah-olah perkebunan merupakan warisan kolonial belanda.

Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan:

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, penen dan pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan.

Lahan perkebunan adalah lahan pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis dan subtropics, yang digunakan untuk menghasilkan

³¹ Syamsul Bahri, *Bercocok tanaman perkebunan tahunan*, Gajah mada university press, Yogyakarta, 1996, hal 5.

komoditas yang menghasilkan komoditas perdagangan(pertanian) dalam skala besar dan di pasarkan ke tempat yang jauh,bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti, kakao, kelapa dan teh. Dalam pengertian bahasa Inggris, ”perkebunan dapat mencakup *plantation* dan *orchard*. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung volume komoditas yang di pasarkan.

3. Prospek komoditi Perkebunan

Komoditi perkebunan memiliki prospek yang cerah, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia,khususnya kawasan Asia, yang mendorong pertumbuhan permintaan dunia terhadap komoditi perkebunan. Disamping itu, peningkatan konsumsi dunia terhadap komoditi perkebunan di picu juga oleh krisis energi dunia, sebagai akibat dari semakin berkurangnya sumber energi yang berasal dari fosil yang merupakan non-renewable natural resource, dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan sehat.³²

Hal yang telah menyebabkan terjadinya transformasi atau perubahan dalam penggunaan sumber daya alam, dari menggunakan non renewable natural resource yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, baik untuk kebutuhan energi maupun untuk kebutuhan *oleochemical*.

³² Akmaludin Hasibuan,*Manajemen perubahan membalik arah usaha perkebunan yang tanggung melalui Strategi optimalisasi efisiensi*, Cv Andi, Yogyakarta, 2012, Hal 16

Prospek komoditi andalan dari perkebunan nasional adalah seperti minyak sawit,karet,kop,teh dan kakao cukup cerah,hal ini tercermin dari perkembangan konsumsi dan produksi dunia untuk masing-masing komoditi.³³

4. Perkebunan Komoditas Kelapa sawit (*Crude palm oil*)

Komoditas tanaman kelapa sawit telah menjadi tanaman primadona masyarakat Indonesia dan memiliki prospek masa depan yang sangat cerah,hal ini wajar karena agribisnis kelapa sawit ini beriorintasi ekspor.Hampir semua negara,dewasa menggunakan minyak kelapa sawit sebagai untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.³⁴

Prospek komoditi kelapa sawit diperkirakan akan tetap cerah, konsumsi dunia akan minyak sawit diperkirakan akan meningkat,baik untuk kebutuhan industri makanan dan chemicals,maupun untuk kebutuhan energi sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui (*non renewable natural resource*), seperti minyak bumi dan batu bara yang ketersediaanya semakin berkurang.³⁵

C. Konsep Umum Lingkungan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian lingkungan hidup yang di temukan dari beberapa literatur terdapat beberapa pengertian yang berbeda-beda, namun suatu kebijakan dan Peraturan perundang-undangan umumnya mencantumkan pengertian

³³ Ibid hlm 16

³⁴ Suyatno nisza, *Masa depan perkebunan kelapa sawit Indonesia,Kanisius,Yogyakarta,2010, hlm 3*

³⁵ Opcit hlm 17

tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup berwujud fisik selain manusia yaitu tanah,air,udara,tumbuhan ,binatang dan seterusnya.³⁶

Definisi Lingkungan Hidup Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup :

“Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan, dan makhluk hidup,termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”³⁷.

2. Ekologi

Ecology adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya,dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya, secara etimologi, kata “ekologi” berasal dari *oikos* (Rumah tangga)dan *logos*(ilmu) yang di perkenalkan dalam ilmu biologi oleh biolog Jerman Entz Hackel³⁸

Selanjutnya Definisi ekologi menurut Otto Sumarwoto adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk dengan lingkungannya. Studi-studi Ekologi meliputi beberapa bidang seperti: ³⁹

- a. Studi ekologi sosial adalah sebagai suatu studi terhadap relasi sosial yang berada di tempat tertentu dan dalam kurun waktu tertentu dan

³⁶ Aditia Syaprillah,*Buku ajar mata kuliah Hukum Lingkungan*,Rajawali pers,Yogyakarta, 2016,hlm 12

³⁷ Ibid

³⁸ Stuart Bell and Donnal Mcgillivray, *Enviromental law* yang dikutip oleh febby Ivalerina “,Demokrasi dan Lingkungan”,*Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*,Volume 1 issue 01(2014),hlm 60.

³⁹ *Ibid* hlm 9

yang terjadinya oleh tenaga-tenaga lingkungan yang bersifat selektif dan distributif.

- b. Studi ekologi manusia sebagai suatu studi tentang interaksi antara aktifitas manusia dan kondisi alam
- c. Studi ekologi kebudayaan sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara variable habitat yang paling relevan dengan inti kebudayaan.
- d. Studi ekologi fisis adalah sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dan sumber daya alamnya.
- e. Studi ekologi biologis sebagai suatu studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya.

3. Asas-asas Ekologi

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang hidup dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk, termasuk manusia dan perilakunya begitu mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi(ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya), alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya. Artinya setiap makhluk hidup berada dalam satu proses penyesuaian diri(adaptasi) dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh asas-asas dalam kelangsungan perikehidupan ekologi tersebut⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Erwin, *Hukum lingkungan dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia*, Bandung, Refika aditama, 2015, hlm 7

Menurut Nursid Sumaatmadja, asas-asas dari ekologi tersebut dapat di Klafikasikan atas :⁴¹

a. Asas Keanekaragaman

Maknanya, bahwa makhluk hidup itu, baik nabati maupun hewani yang ada di alam ini jenis dan jumlahnya sangat beraneka ragam, Tiap makhluk tadi dapat berfungsi sebagai produsen, konsumen, pengontrol atau dikontrol terhadap makhluk hidup lainnya.

b. Asas Kerja Sama

Diantara tumbuh-tumbuhan dan binatang, diantaranya tumbuh-tumbuhan dan sesamanya, di antara binatang dan sesama binatang, serta binatang dan manusia, ada jalinan kerja sama yang menguntungkan yang menunjang terciptanya keseimbangan serta kestabilan, misalnya kumbang menigisap madu, sedangkan tumbuh-tumbuhan dibantu dalam penyerbukan. Burung yang selalu dianggap di atas badan kerbau mendapatkan makanan dari kerbau tersebut, sedangkan kerbau dibantu mengurangi lalat yang mengganggu dirinya. Antara tumbuh-tumbuhan hijau, hewan, dan manusia, dengan bantuan energi matahari ada jalinan kerja pada pernapasan untuk mendapatkan oksigen, karbodioksida dalam bentuk hidrat arang.

c. Asas Persaingan

⁴¹ Ibih hlm 8-9

Persaingan berperan dalam mengontrol pertumbuhan suatu unsur atau komponen yang terlalu pesat yang dapat mengganggu keseimbangan ekologi, misalnya burung hantu yang memangsa tikus di sawah itu berlebihan maka akan merusak tanaman dan merugikan petani, begitupun misalnya antara burung dan belalang, kalau belalang itu pertumbuhannya tidak dikontrol dengan cara dimangsa oleh burung maka belalang tersebut dapat merusak tanaman palawija milik petani.

d. Asas Interaksi

Pertumbuhan dan perkembangan individu atau kelompok jenis makhluk hidup dalam ekosistem terjadi karena ada hubungan timbal arah yang aktif sesamanya. Tanpa adanya interaksi suatu makhluk hidup di satu pihak dan lingkungan di pihak lain akan ada yang mendesak, yang mengalami kemunduran kualitas. Dalam konteks ekologi manusia, interaksi tidak hanya terjadi di antara makhluk hidup. Dalam hal ini, manusia dengan lingkungannya pada ekosistem tertentu, melainkan juga terjadi interaksi daerah produsen dengan daerah konsumen, interaksi antara daerah pertanian.

e. Asas Kesenambungan

Proses kerja sama, persaingan, interaksi di antara makhluk hidup berlangsung secara terus menerus sehingga terjadi proses yang berkesinambungan. Terputusnya proses yang berkesinambungan dapat menimbulkan kehancuran, misalnya proses pendidikan yang dapat

menimbulkan kehancuran bentuk interaksi antara seorang anak atau suatu kelompok dengan lingkungannya terjadi sepanjang hayat.

4. Ekosistem

Satuan pokok ekologi adalah ekosistem atau sistem ekologi, yakni satuan kehidupan yang terdiri dari atas suatu komunitas makhluk hidup (dari berbagai jenis) dengan berbagai benda mati yang berinteraksi membentuk suatu sistem. Ekosistem dapat dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem luarnya.

Kehidupan akan berlangsung dalam berbagai fenomena kehidupan menurut prinsip, tatanan dan hukum atau ekologi seperti homeostatis (keseimbangan), kelentingan, (*resilience* atau *kelenturan*), kompetensi, toleransi, adaptasi, suksesi, evolusi, mutasi, hukum minimum, hukum entropi dan sebagainya.⁴²

Ekosistem ialah terjadinya suatu daerah tertentu di mana di dalamnya tinggal suatu komposisi organisme hidup yang diantara keduanya terjalin suatu interaksi yang harmonis dan stabil, terutama dalam jalinan bentuk-bentuk sumber energi kehidupan⁴³

Ada dua bentuk ekosistem yang penting, yaitu :⁴⁴

⁴² Moh. Sarjani Dkk, *Lingkungan: Sumber daya alam dan kependudukan Dalam pembangunan*, Jakarta, penerbit: Universitas Indonesia, 2008, hlm 3

⁴³ Opcit, hlm 4.

⁴⁴ ibid

- a. Ekosistem alamiah(*natural ecosystem*), di dalam ekosistem alamiah akan terdapat heterogenitas yang tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya
- b. Ekosistem Buatan (*artificial ecosystem*) hasil kerja manusia terhadap ekosistemnya. Untuk ekosistem buatan akan mempunyai ciri keheterogenitasannya sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistem tersebut tetap stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luar yang juga harus di usahakan oleh manusianya, agar berbentuk suatu usaha maintenance atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.

5. Unsur- Unsur Lingkungan Hidup

Lingkungan disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (human Enviromant). Istilah ini biasa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari di sebut lingkungan saja. Dari definisi-definisi diatas, pengertian lingkungan hidup itu dapat di rangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, disebutkan ini golongan sebagai materi. Sedangkan suatu rangkaian unsur-unsur sebagai komponen
- b. Daya, disebut juga dengan energy
- c. Keadaan, disebut dengan situasi dan kondisi
- d. Perilaku atau tabiat

- e. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada
- f. Proses interaksi, disebut juga sering mempengaruhi atau biasa disebut dengan jaringan kehidupan.

6. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan seperti beras, jagung, tomat. Manusia makan daging hewan yang juga merupakan bagian dari lingkungan.

Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara dan sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lainnya sebagai untuk keperluan hidupnya, tetapi tidak hanya manusia yang hidup seperti itu. Makhluk hidup lainnya seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan, juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Burung mencari makanan dari sumber-sumber yang tersedia dari lingkungannya yakni ulat, cacing, air, biji-bijian. cacing bisa hidup dan berkembang biak dari tanah dan binatang-binatang (mikroba) serta dari daun-daunan atau dari binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-

tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus dan zat hara dan sebagainya.

Dari lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, Kebutuhan sekunder atau bahkan lebih memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan, Atas dasar lingkungan hidup pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat dan seni, adanya sepeda, mobil dan motor serta bangunan-bangunan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa manusia dengan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meluruskan kehidupan dan eksistensinya, kalau sejenak kita kaitkan dengan filsafat, maka segala sesuatu ada karena yang ada. Adanya sesuatu karena adanya yang telah berada, dalam hubungan ini, Hidding menyatakan bahwa:

“Semua mempunyai tempatnya dan tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, jadi segala sesuatu yang ada dari yang ada di sekitar, bagian-bagian komponen yang mendampingi dan sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya itulah yang di namakan lingkungan hidup”⁴⁵

7. Sistem Hukum Lingkungan Indonesia(Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)

⁴⁵ Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm

Pasal 28 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperoleh bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Senyatanya, Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih, berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu di lakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menghadapi kondisi yang senyatanya dan seharusnya tersebut, kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini.

8. Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun tujuan akhir pengelolaan lingkungan hidup adalah pelestarian kemampuan unsur-unsur lingkungan, misalnya sumber daya air tanah, udara, manusia dan biologis, untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Unsur-unsur lingkungan, yang menjadi sasaran

kegiatan manusia, bersama-sama membentuk kesatuan sistem lingkungan melalui jaringan keterkaitan yang sangat rumit, dimana gangguan terhadap satu unsur pembentuk lingkungan ini akan mengubah bentuknya.⁴⁶

D. Pengaturan Hukum Mengenai Lingkungan Hidup

Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen-komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergangguhan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak seimbang lagi, Disinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan.

Jadi hukum lingkungan mempunyai dua dimensi :

1. Pertama, adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat diimbau atau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan.
2. Kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Beberapa teori pengertian hukum lingkungan :

⁴⁶ Yongnataran Pongtulan, *Manajemen sumber daya alam dan Lingkungan*, Andy, Yogyakarta, 2015, hlm 16

1. Koesnandi Hasjasoemantri mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa hukum lingkungan adalah :

“Hukum Lingkungan Modrn menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapata secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.”⁴⁷

2. Siti Sundari Rangkuti, memandang :

“Hukum lingkungan tidak hanya berhubungan dengan fungsi hukum, tetapi meliputi juga sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of engineering*) dengan peran sebagai agen of development atau agent of change.”⁴⁸

3. Soemartono mengartikan hukum lingkungan adalah :

“Keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturannya tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi pada pihak yang berwenang.”⁴⁹

4. Menurut St. Mudandjat Danusaputro Hukum Lingkungan adalah :

“Hukum Lingkungan Hidup adalah konsep studi lingkungan hidup yang mengkhususkan pala ilmu hukum, dengan obyek hukumnya adalah tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat terhadap aspek perlindungan sebagai kebutuhan hidup”.⁵⁰

Pengaturan hukum mengenai lingkungan hidup dapat menjamin kepastian ketertiban dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan keadilan,karena hukum memiliki sanksi untuk memkasakan kehendaknya,

⁴⁷ Koesnandi Hadjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada UniversityPress,Yogyakarta. 1995,hlm.32.

⁴⁸ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University-Oress, Surabaya, 1996, hlm 1-2

⁴⁹ Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta,1996,hlm.46.

⁵⁰ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I:Umum*, Binacipta, Bandung,1980,hlm.46.

peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan hanya sebagai sarana penunjang.

“Sebagai sarana penunjang, manfaat dan kemampuan hukum akan tergantung kepada siapa dan dengan cara sempurnanya suatu “sarana” namun jika yang menggunakan tidak memiliki keahlian dan kemahiran, sudah pasti tidak ada manfaat yang dapat diambil dari “sarana” tersebut begitu juga jika tata penggunaannya tidak ditepati secara seksama, mustahil kesempurnaan dan kemampuan sarana tersebut dapat diwujudkan.⁵¹

Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup perlu dipenuhi secara mutlak sekurang-kurangnya tiga syarat, antara lain bentuk dan isi peraturan hukumnya harus tepat dan jelas serta sesuai dengan syarat-syarat hukum baik, para pelaksanaannya harus memiliki keterampilan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan tepat dan lancar dan cara serta prosedur pelaksanaannya hendaknya jelas, tegas dan dapat dimengerti.

1. Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Hak memperoleh informasi lingkungan hidup pada tingkat masyarakat pada saat ini berada pada taraf yang sangat minim, oleh

⁵¹ Sumaatmadja, *op.cit*, hlm.116.

karena itu potensi peran serta masyarakat ini belum dapat efektif seperti yang diharapkan.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup yang dimaksud dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Peran serta masyarakat memerlukan penyaluran informasi kepada masyarakat dengan cara yang berdayaguna, dalam hubungan ini hal yang harus dapat di perhatikan diantaranya sebagai berikut :

a. Pemastian penerima informasi

Ketentuan yang mengharuskan badan-badan yang bersangkutan untuk mengumumkan rencana kegiatan, memperlihatkan dokumen seperti uraian proyek, permohonan izin, laporan hasil studi serta sebagai pendapat dan saran.

b. Informasi tepat waktu(timely informasi)

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup harus dibarengi dengan terbukanya informasi yang bersifat transparan, informasi diberikan pada saat belum diambil keputusan yang mengikat serta masih ada kesempatan untuk mengusulkan alternatif-alternatif.

c. Informasi yang dapat dipahami

Pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup sering meliputi masalah-masalah yang kompleks dan bersifat teknis ilmiah yang sangat rumit, namun harus tetap diusahakan agar informasi mengenai masalah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat luas.

2. Hak Untuk Berperan Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 ayat (4) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :” Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “Masyarakat memiliki hak dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Fungsi dari peran masyarakat tersebut di atur dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

Pelaksanaan masyarakat dilakukan untuk :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan.
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepoloporan masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan loka dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Aspek peran serta masyarakat merupakan suatu hal baru yang merupakan kemajuan yang dapat kita temui dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Masyarakat selama ini selalu menjadi tumbal dan pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi, Pemerintah selama ini cenderung hanya melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan dan keputusan administrative, akan tetapi meliputi peran serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi lingkungan hidup. Pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi kepada Pemerintah

Peran serta masyarakat diperlukan untuk memberi masukan kepada Pemerintah tentang masalah lingkungan yang terjadi di daerahnya masing-masing.

- b. Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan sangat penting karena ini berkaitan dengan lingkungan tempat mereka tinggal, masa depan tanah kelahiran mereka serta hak ulayat yang masih diakui dalam sistem hukum adat. Dan apabila dijalankan dengan mengedepankan kepentingan bersama, maka ini akan mengurangi pertentangan dalam pengambilan keputusan.

c. Membantu perlindungan hukum

Apabila keputusan akhir telah diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka alternative lain dapat dibicarakan, setidaknya-tidaknya sampai tingkatan tertentu. Perlu dipenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini untuk mendayagunakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, antara lain :

- 1) Pemimpin eksekutif yang terbuka
- 2) Peraturan yang akomodatif
- 3) Lembaga swadaya masyarakat yang tanggap
- 4) Informasi yang tepat, dan
- 5) Keterpaduan